

Gugatan perceraian dengan alasan virginitas menurut UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam studi kasus putusan no. 019/ PDT. G/2007/ PA Bks = virginity as the reason for divorce lawsuit according to the law marriage number 1 of 1974 and the compilation of islamic law a case study of religious court decision number 019/ PDT. G/2007/PA Bks

Adinda Kartina Djuarsa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402607&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam skripsi ini dibahas mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya karena diduga sudah tidak perawan lagi pada saat menikah dengan dirinya. Terdapat tiga konsep utama dalam studi ini yakni, perkawinan, gugatan perceraian, dan keperawanan, dimana definisi operasional mengenai ketiga konsep tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada dua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini : (1) apakah gugatan perceraian yang disebabkan karena isteri sudah tidak perawan lagi dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dan (2) bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait perkara ini dipandang dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

.....

This thesis discusses about the divorce lawsuit filed by a husband against his wife by reason of his wife allegedly is not virgin any more. The thesis also defines operationally three basic concepts of the study namely, marriage, divorce lawsuit, and virginity that are related to the definitions that fall within the provisions of the Marriage Law Number 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law. There are two research questions proposed in this study namely : (1) whether or not a divorce law suit by reason of virginity can be granted by the Religious Court, and (2) how the Religious Court decision on this matter is seen from the perspectives of the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law Number 1 of 1974.